

Bandar Lampung, 14 Januari 2026

No. : 009/LLB-BDL/DIR.UM/I/2026

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO,
Komp. PATRA II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih- Jakpus

Perihal: Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Bersama ini kami Sampaikan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama (*terlampir*).

Demikian agar maklum dan Kami Mengucapkan Terimkasih.

PT. BPR LANGGENG LESTARI BERSAMA
Direksi,



JUNAIDI
Direktur Utama



Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025

From pusat@banklanggeng.co.id <pusat@banklanggeng.co.id>

Date Thu 22 Jan 2026 16:32

To mailingroomkolp@ojk.go.id <mailingroomkolp@ojk.go.id>; Yudha Ariandela <yudha.ariandela@ojk.go.id>

📎 1 attachment (6 MB)

Laporan Transparansi Tata Kelola PT BPR Langgenglestari Bersama.pdf;

Kepada Yth,

Kepala Kantor OTORITAS JASA KEUANGAN

Provinsi Lampung

Jl. Way Sekampung No. 9

Di –

Bandar Lampung

Perihal: Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Bersama ini kami Sampaikan hasil Scan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama (*terlampir*).

Terima kasih,

Best Regards

PT. BPR Langgenglestari Bersama

Jl. Laksamana Malahayati No. 7-7A, Teluk Betung - Bandar Lampung

No. Telp. 0721 - 487878

Bandar Lampung, 14 Januari 2026

No. : 005/LLB-BDL/DIR.OJK/I/2026

Kepada Yth,

Kepala Kantor OTORITAS JASA KEUANGAN
Provinsi Lampung
Jl. Way Sekampung No. 9
Di –
Bandar Lampung

Perihal: Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Bersama ini kami Sampaikan hasil Scan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama (*terlampir*).

Demikian agar maklum dan Kami Mengucapkan Terimkasih.

PT. BPR LANGGENGLESATARI BERSAMA
Direksi,



**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
TAHUN 2025**



**JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A
TELEPON: 0721 487878**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Langgeng Lestari Bersama
Alamat	Jl. Laksamana Malahayati No. 7-7A, Teluk Betung - Bandar Lampung
Nomor Telepon	0721-487878

Penjelasan Umum:

Dalam upaya menciptakan kegiatan perbankan yg sehat & berkualitas BPR selalu berupaya menerapkan GCG, baik dari segi Kecukupan Governance Structure agar tidak terjadi rangkap jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dari internal atau eksternal dan pembinaan dari Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris atau pimpinan unit kerja masing masing. Kinerja BPR dapat terlihat pada laporan keuangan kualitatif & kuantitatif. Kinerja kualitatif telah dilakukan perbaikan antara lain pembuatan SK Direksi dan melakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur dengan menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Kinerja kuantitatif pada Neraca & L/R ada perbaikan bila dibandingkan dengan kinerja laporan keuangan 2024. Beberapa rasio keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan target tercapai, sedangkan yg memerlukan perbaikan pada tahun berikutnya adalah Cadangan Penurunan Nilai [CKPN]

BPR memiliki komitmen yg kuat untuk melaksanakan GCG yg telah diatur oleh OJK, agar BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan GCG yang baik pada BPR didukung oleh integritas yg tinggi melalui proses intern yg melibatkan seluruh organ BPR dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan agar penerapan GCG menjadi budaya perusahaan dalam setiap kegiatan usaha.

BPR Langgeng telah beroperasi lebih dari 29 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen BPR untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola.

Pada tahun 2025 PT. BPR Langgeng Lestari Bersama masih terdapat kekurangan penunjang tata kelola yaitu masih belum terpenuhinya struktur Direksi yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan rencana pemenuhan akan dilakukan pada tahun 2026 sesuai dengan action plan rencana tindak merger yang akan dilakukan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak cukup signifikan dan yang masih memerlukan perhatian manajemen pemenuhan struktur tata kelola yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan peningkatan Sistem informasi manajemen serta peningkatan kualitas SDM dalam menerapkan budaya

kepatuhan agar kedepan BPR dapat lebih baik lagi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Junaidi
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan BPR secara profesional, berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan BPR sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan 12 aspek Penerapan tata Kelola.		
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS.		
f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
g. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis BPR		
h. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.		
i. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.		
j. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.		
k. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.		
l. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai		
m. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang telah dibuat		
n. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR dan BPR Syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
o. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah menindaklanjuti dengan membuat SK Direksi tentang Penunjukan penanggung jawab dan wewenang penggunaan internet banking dengan Nomor SK Direksi : 008/ LLB-BDL/ DIR.SK/ IX/2025 tanggal 22 September 2025 [tindaklanjut dewan komisaris poin 1, 2 dan 3]
2. Direksi telah menindaklanjuti dengan membuat SK Direksi tentang revisi perjalanan dinas, upah kerja lembur hari kerja/ hari libur/ hari besar bagi karyawan/ pegawai PT. BPR Langgenglestari Bersama, dengan nomor SK Direksi: 004/ LLB- BDL/ DIR.SK/ IX/2025 tanggal 09 September 2025, SK Direksi tentang tunjangan tetap dan penetapan tunjangan jabatan karyawan/pegawai PT. BPR Langgenglestari Bersama, dengan nomor SK Direksi: 005/LLB-BDL/DIR.SK/IX/2025 tanggal 09 September 2025, SK Direksi tentang Kebijakan dan prosedur penugasan karyawan Sebagai alternate dengan nomor SK Direksi: 006/LLB-BDL/DIR.SK/IX/2025 tanggal 09 September 2025 [tindaklanjut dewan komisaris poin 4]
3. Direksi telah menindaklanjuti dengan melakukan membuat Permohonan dan persetujuan penggunaan jasa AP dan KAP untuk periode pemeriksaan tahun 2026 data tahun 2025 dan telah melakukan RUPSLB secara Sirkuler sesuai undangan pada tanggal 04

November 2025 [tindaklanjut dewan komisaris poin 5]

4. Direksi belum menindaklanjuti terkait rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Desember 2025 [tindaklanjut dewan komisaris poin 6 dan 7] dan berkomitmen akan menindaklanjuti untuk perlode semester 1 tahun 2026

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi akan menjadi perhatian kedepan agar pelaksanaan kepatuhan dan penerapan tata kelola BPR dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Hardy Yunnaraga
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
(1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR (5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. (6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat		
2.	Nama	Kaswadi
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
(1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR (5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan		

Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

(6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan
- b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Penunjukan User hak Akses terhadap aplikasi CMS secara berjenjang
2. Membatasi kewenangan pejabat kantor cabang [cabang pringsewu dan cabang wayhalim] dalam mengakses pada aplikasi CMS
3. Kewenangan untuk mengeluarkan pembayaran/penarikan dengan menggunakan aplikasi CMS hanya dapat dilakukan oleh anggota Direksi yang diberi kewenangan.
4. Evaluasi SK Direksi Tentang Penugasan karyawan/ Pegawai sebagai Alternate BPR, Evaluasi SK Direksi Tentang Tunjangan Tetap dan Tunjangan Jabatan Karyawan/Pegawai BPR, Evaluasi SK Direksi Revisi Perjalanan Dinas, Upah Kerja lembur hari kerja/hari libur/ hari besar bagi Karyawan/pegawai BPR.
5. Penyelenggaraan RUPSLB dan/ atau RUPSLB sirkuler untuk penunjukan AP/KAP untuk pemeriksaan data tahun 2025 diperiksa tahun 2026.
6. Evaluasi Kebijakan penetapan Risk Appatite dan Risk Tolerance serta tata cara penilaian sendiri Risk Appatite dan risk tolerance BPR tahun 2025 yang di nilai belum sesuai dengan ketentuan.
7. Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Intern yang belum optimal

Rekomendasi kepada Direksi tersebut berdasarkan Risalah rapat Dewan Komisaris pada semester 2 tahun 2025.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Saat ini PT. BPR Langgenglestari Bersama belum memiliki Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

PT. BPR Langgenglestari Bersama tidak memiliki Struktur Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Persentase Kepemilikan (%)	48,86

Pada Periode Pelaporan Semester 2 Tahun 2025 tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Komisaris [Kaswadi] pada BPR, hanya Komisaris Utama [Hardy Yunnaraga] yang memiliki saham pada BPR dan sebagai PSP.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artharindo
	Persentase Kepemilikan (%)	21,72
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	21,72
2.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Supradanamas
	Persentase Kepemilikan (%)	73,35
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	73,35
3.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Prabumegah Kecana
	Persentase Kepemilikan (%)	43,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	43,58
4.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPRS Artha Aceh
	Persentase Kepemilikan (%)	34,52
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	34,52
5.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dana Selaras Sentosa
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00
6.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	22,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,50

7.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Margahayu
	Persentase Kepemilikan (%)	14,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	14,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthurindo
	Persentase Kepemilikan (%)	22,03
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,03
2.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Prima Perkasa
	Persentase Kepemilikan (%)	60,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	60,00
3.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Mitra persada
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
4.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Mitra Lestari
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	40,00
5.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Prima Dana Abadi
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
6.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPRS Artha Aceh Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	20,13

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,13
7.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Supradana Mas
	Persentase Kepemilikan (%)	3,40
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,40
8.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dana Selaras Sentosa
	Persentase Kepemilikan (%)	28,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	28,00
9.	Nama	Lindawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Margahayu
	Persentase Kepemilikan (%)	32,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	32,00
10.	Nama	Nofian
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Supradanamas
	Persentase Kepemilikan (%)	3,60
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,60
11.	Nama	Nofian
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthurindo
	Persentase Kepemilikan (%)	0,35
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,35
12.	Nama	Nofian
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Mitra Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00
13.	Nama	Grace Agustina
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Supradanamas
	Persentase Kepemilikan (%)	13,35

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	13,35
14.	Nama	Grace Agustina
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthurindo
	Persentase Kepemilikan (%)	45,77
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	45,77
15.	Nama	Rudi Limardi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Mitra Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	35,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	35,00
16.	Nama	Rudi Limardi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00
17.	Nama	Rudi Limardi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Artha Margahayu
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	Junaidi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Kaswadi

Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain pada PT. BPR Langgenglestari Bersama tidak ada Kepemillkan.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Junaidi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Kaswadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR tidak memiliki hubungan keuangan

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Junaldi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Hardy Yunnaraga
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Kaswadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR tidak memiliki hubungan keluarga.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp462.369.240
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp428.568.000
--	---------------

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp165.721.976
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp52.102.462

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp91.530.770
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp76.154.000
--	--------------

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp24.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp8.368.698
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp8.039.565

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS adalah untuk Direktur Utama diberikan Fasilitas Kendaraan roda empat Mobil Kijang Inova Zenix dan Komisaris Utama diberikan Fasilitas Kendaraan roda empat Mobil Kijang Inova Venturer.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	22,13 : 1
-------------	-----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,33 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,88 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,96 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	05 Februari 2025
----	---------------	------------------

Jumlah Peserta	6 orang
----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Hasil perhitungan CKPN per 31 Desember 2024
2. Pembahasan perubahan metode perhitungan CKPN Realisasi Per 31 Januari 2025

2.	Tanggal Rapat	06 Februari 2025
----	---------------	------------------

Jumlah Peserta	5 orang
----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi Debitur Penanganan Lawyer

3.	Tanggal Rapat	18 Februari 2025
----	---------------	------------------

Jumlah Peserta	15 orang
----------------	----------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Rencana Penggabungan
2. Pembahasan Nilai Buku Per Lembar Saham
3. Pembahasan Lainnya

4.	Tanggal Rapat	27 Februari 2025
	Jumlah Peserta	8 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Progres Penyelesaian Hapus Buku dan NPL

5.	Tanggal Rapat	22 Mei 2025
	Jumlah Peserta	16 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan kinerja kantor pusat dan kantor cabang per April 2025 [per cabang maupun konsolidasi]
2. Pembahasan action plan merger
3. Pembahasan migrasi sistem dan Pembahasan dokumentasi penerapan CKPN untuk individual assessment

6.	Tanggal Rapat	12 Juni 2025
	Jumlah Peserta	10 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Struktur Organisasi dan Budaya Perusahaan
2. Pembahasan Kinerja Masing-masing BPR Posisi Mei 2025
3. Pembahasan migrasi sistem Penyamaan COA masing-masing BPR peserta Merger
4. Pembahasan Proses Pasca Merger
5. Pembahasan Metode Perhitungan CKPN peserta Merger

7.	Tanggal Rapat	25 Juni 2025
	Jumlah Peserta	5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Kinerja BPR per Mei 2025
2. Pembahasan Revisi RBB untuk tahun 2025
3. Pembahasan lainnya

8.	Tanggal Rapat	03 September 2025
	Jumlah Peserta	5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Revisi SK Direksi Tentang Perjalanan dinas dan Upah kerja lembur, hari kerja dan hari libur
2. Penetapan Tunjangan Tetap karyawan dan revisi tunjuangan jabatan

9.	Tanggal Rapat	18 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	10 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pencapaian Target RBB Per September 2025 untuk seluruh kantor KP dan KC PT. BPR Langgenglestari Bersama

10.	Tanggal Rapat	19 November 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Untuk BPR Setelah Penggabungan	
11.	Tanggal Rapat	24 Desember 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Revisi Penetapan Risk Appatite dan Risk Tolerance untuk Jenis Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas serta rencana penambahan Jenis Risiko Reputasi dan Risiko Strategik untuk tahun 2026 2. Pembahasan Rencana kerja Audit Intern untuk tahun 2026 3. Pembahasan Lainnya 	

Rapat dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan pada periode tahun 2025 adalah rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. BPR Langgenglestari Bersama

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hardy Yunnaraga
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kaswadi
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang dilakukan pada tahun 2025 adalah Rapat yang dilakukan sendiri oleh dewan komisaris [rapat dewan komisaris] dan rapat yang dihadiri oleh Komisaris didalam rapat dengan Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. BPR Langgenglestari Bersama.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus

Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan

0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan

0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya

0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan

0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan

0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya

0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan

0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya

0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan

0 kasus

Pada periode pelaporan Tahun 2025 di PT. BPR Langgenglestari Bersama TIDAK terdapat Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

3 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian

1 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian

0 kasus

Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT.BPR Langgenglestari Bersama periode tahun 2025, semua terkait dengan Debitur yang mengajukan keberatan terhadap:

1. Lelang
2. Penetapan Pengadilan terkait Eksekusi Jaminan
3. Gugatan Pihak ketiga kepada BPR permasalahan sewa menyewa jaminan yang menjadi agunan di BPR tanpa sepengetahuan BPR.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2025 TIDAK terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	04 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan [forum penyalur bantuan sosial]
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan untuk Bencana Banjir di daerah Lempasing-Lampung
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, pada tahun 2025 PT. BPR Langgenglestari Bersama memberikan bantuan sosial kepada daerah yang mengalami bencana banjir yaitu diwilayah Lempasing Kec. Keteguhan, Kota Bandar Lampung, melalui lembaga Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan [forum penyalur bantuan sosial]

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR LANGGENG LESTARI BERSAMA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

PT. BPR LANGGENG LESTARI BERSAMA


HARDY YUNNARAGA
Komisaris Utama




JUNAIDI
Direktur Utama